



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN RENCANA KINERJA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISITRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 489 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Daftar Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah, Instruksi Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020 serta Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 116 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas pencapaian target perlu disusun rencana kegiatan strategis daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penanggungjawab Kegiatan Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021 dengan Keputusan Walikota;

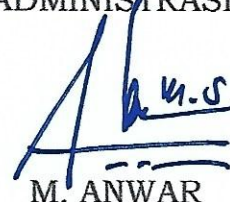
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
7. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah, Instruksi Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENANGGUNGJAWAB RENCANA KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021.
- KESATU : Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Para Asisten Agar Memonitor, Mengevaluasi serta Melaporkan Hasil Kegiatan Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur yang menjadi Tanggung Jawab sesuai Bidangnya Kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KETIGA : Para Kepala Bagian Bertanggungjawab untuk Membuatkan Rencana Aksi Kegiatan Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021 dan Melaksanakan serta Melaporkan Hasil Pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021 yang Menjadi Tanggung Jawabnya sesuai Lampiran Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Sebagai PIC;
- KEEMPAT : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bertanggungjawab untuk Memonitor, Mengevaluasi Penginputan Pelaksanaan Pencapaian Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2021
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda. Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Para Asisten Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Para Kepala Bagian Setko. Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
 Nomor 94 Tahun 2021
 Tanggal 26 Februari 2021

RENCANA KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021

| Sasaran | NO | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Triwulan | | | | Tahunan | Keterangan | Penanggungjawab |
|---|----|--|-------------|--|----------|-----|-----|----|---------|------------|---|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| Program Strategis | | | | | | | | | | | |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur | 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | e-SAKIP | Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: a. Manajemen Perubahan b. Penguatan pengawasan c. Penguatan akuntabilitas d. Penataan Organisasi e. Penataan tatalaksana f. Penataan manajemen SDM g. Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian PAN-RB. | N/A | N/A | N/A | 85 | 85 | Nilai | Bagian KKPP, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Tatalaksana, Sub Bagian Pelayanan Publik. |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Timur | 1 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan) | e-SAKIP | Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro ORB sesuai tugas melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen IKM Provinsi DKI Jakarta untuk dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB. IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKM / Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM | N/A | N/A | N/A | 86 | 86 | Indeks | Kecamatan dan Kelurahan, Bagian KKPP, Sub Bagian Pelayanan Publik. |

| O | Sasaran | NO | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Triwulan | | | | Tahunan | Keterangan | Penanggungjawab |
|---|--|----|--|-------------|--|----------|------|------|------|---------|------------|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | | | |
| 3 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | 1 | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | e-SAKIP | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran diukur dari 3 Komponen yaitu: a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja barang, belanja modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu belanja barang dan belanja modal yang telah ditetapkan di lingkungan perangkat daerah b. Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari suatu kegiatan yang target sarannya telah dicapai. apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. hasil lebih sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk kegiatan /belanja lainnya c. pencapaian output : output belanja adalah output yang terdapat pada DPA perangkat daerah. realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran. formulasi pengukuran adalah sebagai berikut: capaian = (penyerapan anggaran X 40%) + (efisiensi X 10%) + (pencapaian output X 50%) | N/A | N/A | N/A | 91% | 91% | Persentase | Bagian Keuangan Sub Bagian PDA |
| | Meningkatnya kewirausahaan baru | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu nomor (20) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase | Bagian Perekonomi Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan dan KUKM. |
| | Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase | Bagian PLH, Sub Bagian Penataan Ruang dan Pertanahan. f 21/03 |

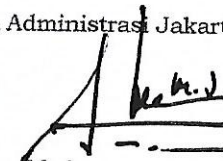
| NO | Sasaran | NO | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Triwulan | | | | Tahunan | Keterangan | Penanggungjawab |
|----|--|----|--|-------------|--|----------|------|------|------|---------|------------|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | | | |
| 6 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Nomor(38) | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase | Bagian PLH, Sub Bagian Penata Ruang dan Pertanahan. |
| | | 2 | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase | Bagian Keuangan, Sub Bagian PDA (Bagian KKPP, Sub Bagian Tatalaksana. |
| | | 3 | Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58) | N/A | 100% | N/A | N/A | 100% | Persentase | Bagian PLH, Sub Bagian Penata Ruang dan Pertanahan. |
| 7 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor(61) | N/A | 100% | N/A | 100% | 100% | Persentase | Bagian Keuangan, Sub Bagian Tata Usaha Keuangan. |
| | | 2 | Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nomor (63) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63) | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | Persentase | Bagian KKPP, Sub Bagian Tatalaksana. |
| 8 | Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan nomor (66) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase | Bagian PLH, Sub Bagian Pekerjaan Umum, Sub Bagian Penata Ruang dan Pertanahan, Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau. |

| Sasaran | NO | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Triwulan | | | | Tahunan | Keterangan | Penanggungjawab |
|---|----|---|-------------|--|----------|------|------|------|---------|------------|--|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| wujudnya sarana dan sarana transportasi yang aman, memadai, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian nomor (73) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73) | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% | Persentase | Bagian PLH, Sub Bagian Penataan Ruang dan Pertanahan. f 02/03 |
| Khusus | | | | | | | | | | | |
| meningkatkan pemanfaatan E-chasing dalam pengadaan Barang dan Jasa | 1 | Persentase Pemanfaatan E-Order | e-Kinerja | Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase | Bagian Keuangan, Sub Bagian perbendaharaan, Bagian Umum dan Protokol, Sub Bagian Protokol. 6/12 |
| wujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan Daerah yang transparan dan akuntabel | 1 | Opini laporan keuangan daerah | e-Kinerja | Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)) | N/A | 3 | N/A | N/A | 3 | WTP | Bagian Keuangan, Sub Bagian Tata Usaha Keuangan. 6/12 |

| NO | Sasaran | NO | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Triwulan | | | | Tahunan | Keterangan | Penanggungjawab |
|--------------------------|---|----|---|-------------|---|----------|------|------|-----------|-----------|------------|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | | | |
| 3 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | 1 | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | e-Kinerja | a) Persentase penyusunan communication plan (strategi komunikasi) program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per tahun sesuai dengan PD masing-masing pada bulan April 2021. *Template communication plan mencakup minimal : Identifikasi masalah, Tujuan, Pesan Utama, Target Audience, Rencana Kegiatan dan Editorial plan *Verifikasi communication plan dilakukan oleh Asisten dibantu Diskominfo. b) Persentase penyusunan calendar of events dan communication tools standard untuk program umum dan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per triwulan sesuai dengan PD masing-masing. Diskominfo menyusun calendar of events dan communication tools standard di level Provinsi. c) Persentase penyusunan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis sesuai SOP yang disusun Diskominfo per triwulan. d) Persentase penyiapan bahan paparan Rapat Koordinasi Komunikasi Publik per bulan dan di Validasi oleh Tim Komunikasi yang dipimpin oleh Asisten. | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase | Bagian Umum Sub Bagian Tata Usaha Bagian PLH, Sub Bagian Penerimaan Umum |
| 4 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 | E-Kinerja | Nilai/predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah oleh Inspektorat (nilai 81) | n/a | n/a | n/a | A (81) | A (81) | Predikat | Bagian Keuangan, Sub Bagian Program dan Anggaran. |
| Dasar Operasional | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 1 | Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | e-Kinerja | Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase | Bagian KKPP, Sub Bagian Pelayanan Publik. 1/2/21 |
| 2 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | 1 | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | CRM | Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase | Bagian KKPP, Sub Bagian Pelayanan Publik. 1/2/21 |
| 3 | Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat | 1 | Survei Kepuasan Layanan Masyarakat | Jaksurvei | Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei | 85% | 87% | 90% | 93% | 93% | Persentase | Bagian Pemerintahan, Sub Bagian Bina Pemerintahan. |

| NO | Sasaran | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Triwulan | | | | Tahunan | Keterangan | Penanggungjawab |
|----|--|---|-------------|---|----------|-----|-----|-----|---------|------------|--|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| 1 | Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | e-Kinerja | Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Persentase | Bagian Keuangan, Sub Bagian Tata Usaha Keuangan. |

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar

NIP 196605281998031003